KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Jenderal Andika Sebaiknya Evaluasi Operasi di Papua
Tanggal : Selasa, 09 November 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Jenderal Andika Sebaiknya Evaluasi Operasi di Papua

RAPAT Paripurna DPR kemarin menyetujui calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa yang telah diajukan Presiden Joko Widodo kepada Dewan, pekan lalu.

"Apakah laporan Komisi I DPR tentang pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi dan persetujuan Jenderal Andika sebagai calon Panglima TNI dapat disetujui," tanya Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna secara virtual dan fisik menyatakan setuju Jenderal Andika sebagai calon Panglima TNI.

Terpilihnya Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI diharapkan membuat TNI semakin dekat dengan rakyat dan selalu di garis depan pertahanan negara.

"Selamat kepada calon Panglima TNI. Semoga dapat menjalankan peran strategis dalam memimpin TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Kami berharap TNI juga berperan membantu penanganan covid-19 di Tanah Air," lanjut Puan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan meski Panglima TNI Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun pada 8 November 2021, penurunan jabatan tidak mesti dilakukan pada tanggal tersebut.

"Jadi, tidak mutlak berdasarkan tanggal dan bulan lahirnya. Itu bisa diperpanjang hingga satu bulan untuk memberikan waktu pergantian. Tradisi yang berjalan di TNI seperti itu," jelas Moeldoko.

Sementara itu, pengamat militer Al Araf meminta calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berani mengevaluasi operasi militer di Papua. Pengerahan tentara di Papua selama ini perlu ditinjau karena dianggap menyalahi prosedur dan Undang-Undang TNI.

"Kalau panglima baru menyatakan komitmen pertama menjalankan tugas sesuai undang-undang, hal pertama evaluasi operasi militer di Papua karena melanggar UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," kata Al Araf.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative itu menilai penting janji Andika Perkasa ketika mengikuti uji kelayakan di Komisi I DPR. Dalam pemaparan visi dan misi, Andika menyatakan akan menjalankan tugas sesuai UU TNI.

"Pertanyaannya beranikah dari visi dan misi itu direalisasikan ke dalam sebuah sikap dan tindakan nyata bahwa TNI bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan," imbuh Al Araf.

Menurut UU TNI, lanjut Al Araf, operasi selain perang salah satunya mengatasi pemberontakan bersenjata baru bisa dilakukan dengan keputusan politik negara. (Sru/Pra/Dhk/Ant/X-3)